

## KONFERENSI MEJA BUNDAR DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSISTENSI KEMERDEKAAN INDONESIA

### THE ROUND TABLE CONFERENCE AND ITS INFLUENCE ON THE EXISTENCE OF INDONESIAN INDEPENDENCE

Gentri Berlian Gea, Subaryana, Anggar Kaswati  
IKIP PGRI Wates

#### ABSTRAK

*Penulisan ini bertujuan: untuk mengkaji tentang latar belakang pelaksanaan Konferensi meja bundar, pelaksanaan Konferensi meja bundar, dan pengaruh Konferensi meja bundar terhadap eksistensi kemerdekaan Indonesia. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sejarah dengan langkah-langkah: pengumpulan data, melakukan kritik data, analisis dan pembahasan, menyimpulkan dan penulisan. Kedatangan Belanda pasca kemerdekaan RI ingin menegakkan kembali kolonialisme di Indonesia. Bangsa Indonesia yang telah merdeka dengan tegas menentang kolonialisme. Dalam menghadapi Belanda, Pemerintah RI berjuang dengan strategi perjuangan fisik dan diplomasi. Pihak Belanda tidak konsekuen terhadap hasil-hasil perundingan dengan melakukan Agresi Militernya sampai dua kali. Akibat dari Agresi Militer Belanda ternyata menimbulkan protes, kecaman, dan tekanan dari dunia. Akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi tanggal 28 Januari 1949. Komisi PBB akhirnya dapat memaksa Belanda untuk menyelesaikan permasalahan melalui meja perundingan yang disebut KMB. Konferensi Meja Bundar diselenggarakan tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949 di Den Haag dengan menghasilkan tiga induk persetujuan, yakni: Piagam Penyerahan Kedaulatan, Piagam Uni Indonesia-Belanda dengan lampiran persetujuan pemerintah Kerajaan Belanda dan pemerintah RIS, dan Peraturan Peralihan yang memuat peraturan-peraturan yang bertalian dengan penyerahan kedaulatan. Dengan Konferensi Meja Bundar bangsa Indonesia mulai memasuki era baru dalam kehidupan pemerintahan. Bentuk negara yang dihasilkan Konferensi Meja Bundar Negara Serikat kurang dapat diterima oleh rakyat. Akibat banyaknya tuntutan dari negara-negara bagian, akhirnya kembali menjadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang.*

**Kata Kunci:** Konferensi meja bundar, Kemerdekaan, Indonesia

#### ABSTRACT

*This writing aims: to examine the background of the implementation of the Round Table Conference, the implementation of the Round Table Conference, and the influence of the Round Table Conference on the existence of Indonesian independence. and discussion, conclusion and writing. The arrival of the Dutch after the independence of the Republic of Indonesia wanted to re-establish colonialism in Indonesia. The independent Indonesian nation firmly opposed colonialism. In facing the Dutch, the Government of the Republic of Indonesia struggled with a strategy of physical struggle and diplomacy. The Dutch were not consistent with the results of the negotiations by carrying out their Military Aggression twice. The result of the Dutch Military Aggression turned out to be causing protests, criticism, and pressure from the world. Finally, the UN Security Council issued a resolution on January 28, 1949. The UN Commission was finally able to force the Netherlands to resolve the problem through a negotiating table called the KMB. The Konferensi Meja Bundar was held from 23 August 1949 to 2 November 1949 in The Hague by producing three main agreements, namely: the Transfer of Sovereignty*

*Charter, the Indonesian-Dutch Union Charter with an attachment to the approval of the Kingdom of the Netherlands and the RIS government, and the Transitional Regulation which contained regulations that related to the transfer of sovereignty. With KMB, the Indonesian nation began to enter a new era in government life. The form of state produced by the United States Konferensi Meja Bundar is less acceptable to the people. Due to the many demands from the states, it finally returned to the form of the Unitary State of the Republic of Indonesia until now.*

**Keywords:** Round Table Conference, Independence, Indonesia

## Latar Belakang

Sejak berakhirnya Perang Dunia II bangsa Indonesia merupakan daerah jajahan yang pertama menyatakan kemerdekaannya yakni tanggal 17 Agustus 1945. Namun pendaratan pasukan Sekutu (Inggris) diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration) yang menyebabkan kota-kota besar telah berhasil diduduki oleh Belanda. Hal ini dilakukan oleh Belanda karena merasa kesulitan untuk kembali secara langsung menguasai wilayah Indonesia (Purnawan Tjondronegoro, 1992:iii). Pendaratan Belanda melalui tentara Sekutu tersebut menyebabkan terjadinya pertentangan antara kaum pejuang Indonesia dengan pasukan asing (tentara Inggris dan Belanda). Karena kedua belah pihak (Pemerintah RI dan Belanda) mempunyai tujuan yang berbeda, maka perselisihan tidak dapat dihindari.

Lord Killearn dipercaya oleh Inggris untuk meredam terjadinya konflik Indonesia-Belanda. Langkah yang diambil Lord Killearn adalah segera mempertemukan kedua belah pihak. Pertemuan pendahuluan diselenggarakan tanggal 10 November 1946 di daerah Linggarjati dan berhasil dicapai persetujuan tanggal 25 Maret 1947. Dalam perundingan hadir: Lord Killearn (Inggris sebagai penengah), delegasi RI dipimpin Sutan Syahrir, sedang delegasi Belanda dipimpin Schermerhorn (Rushdy Hoesein, 2010:191). Asas-asas pokok Persetujuan Linggarjati adalah sebagai berikut: Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia sebagai *de facto* menjalankan kekuasaan atas Jawa, Madura dan Sumatra. Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama supaya segera terbentuk Negara Indonesia Serikat yang berdaulat dan merdeka atas dasar demokratis dan federal (Ide Anak Agung Gde Agung, 1983:37-39).

Meski naskah sudah ditandatangani kedua belah pihak, hubungan RI dengan Belanda tidak juga bertambah baik. Hal tersebut disebabkan akibat dari perbedaan

penafsiran mengenai beberapa pasal persetujuan yang menjadi pangkal perselisihan. Keadaan semakin genting, pada tanggal 20 Juli 1947 pihak Belanda tidak lagi mengakui isi perundingan Linggarjati dan bebas bertindak. Keesokan harinya tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan penyerangan terhadap daerah-daerah RI, baik di Jawa maupun di Sumatra dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Tujuan aksi militer Belanda yang pertama ialah menduduki seluruh Jawa Barat, perluasan daerah-daerah yang telah diduduki di sekitar kota-kota besar di Jawa. Serta pendudukan daerah-daerah perkebunan dan minyak di Sumatra (Ide Anak Agung Gde Agung, 1997:45). Melihat sasaran yang diduduki tersebut, jelas pihak Belanda akan menghancurkan RI dalam bidang politik, ekonomi maupun militer, sehingga dapat memperkecil kekuatan RI.

Agresi Militer Belanda yang dilakukan pada tahap pertama memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda, sebab dapat merebut daerah-daerah potensial utama di bidang ekonomi wilayah RI. Namun dampak negatifnya, menimbulkan reaksi dunia internasional. Akhirnya Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya permusuhan harus dihentikan. Soal penyelesaian perselisihan dilakukan melalui cara damai atau perundingan (Nyoman Dekker, 1980:57).

Untuk mengatasi masalah Indonesia-Belanda, DK-PBB mengundang delegasi Indonesia (Sutan Syahrir) pada bulan Agustus 1947 untuk dimintai keterangan. Akhirnya segera dibentuk Komisi Jasa Baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Komisi ini terdiri dari tiga negara dan masing-masing pihak yang berselisih menunjuk seorang wakil dan kedua wakil yang ditunjuk itu memilih wakil sebagai pihak ketiga. Pihak RI (Sutan Syahrir) menunjuk wakil Australia (Kirby) untuk duduk dalam panitia, Belanda (van Kleffens) menunjuk Belgia (van Zeeland) dan Australia-Belgia menunjuk Amerika Serikat (Graham) sebagai anggota ketiga (M.D Poesponegoro & N. Notosusanto, 1990:137). Karena komisi tersebut terdiri dari tiga negara, kemudian disebut Komisi Tiga Negara yang disingkat dengan KTN.

Berkat kerja keras KTN, akhirnya dapat mempertemukan antara RI dengan pihak Belanda di sebuah kapal milik Amerika Serikat bernama Renville. Dalam perundingan tersebut hadirlah pihak-pihak: Pihak PBB sebagai penengah (mediator) dengan Graham sebagai ketua, van Zeeland dan Kirby sebagai anggota. Pihak Republik Indonesia,

dengan Amir Syarifuddin sebagai ketua delegasi, Ali sastroamidjojo, H. Agus Salim, Dr. Leimena, Dr. Coa Tik Ien dan Nasrun sebagai anggota. Pihak Belanda dengan R. Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketua delegasi, Mr. H.A.L. van Vredenburg, Dr. P.J. Koets, Mr. Dr. Chr. Soumokil sebagai anggota dan lain-lainnya. (Nyoman Dekker, 1980:60)

Hasil perundingan tak kunjung membuahkan hasil yang memuaskan bagi Indonesia, terbukti pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 diserbulah ibukota RI (yogyakarta). Mula-mula rakyat Yogyakarta tidak curiga adanya kapal terbang yang meraung-raung di angkasa, karena dikabarkan TNI akan mengadakan latihan perang. Ketika pesawat-pesawat tersebut melakukan tembakan gencar, baru sadarlah rakyat bahwa mereka sedang diserbu musuh. Sesuai dengan namanya (*Operatie Kraai*) Serangan tersebut dilakukan untuk menangkap para pimpinan dan pegawai RI agar tulang punggung perlawanan RI dapat dipatahkan. Namun sebelum presiden dan wakil presiden RI bersama tokoh berhasil ditawan tentara Belanda, presiden Sukarno telah memberi kuasa kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera Utara dan apabila gagal maka akan dialihkan kepada A.A. Maramis untuk mendirikan pemerintah dalam pengasingan di New Delhi. Agresi Militer yang dilancarkan oleh Belanda tahap dua tersebut menimbulkan reaksi yang sangat keras dari negara-negara di dunia. (Ide Anak Agung Gde Agung, 1983:214).

Tugas KTN semakin rumit kemudian KTN diubah menjadi United Nations Commission For Indonesia (UNCI) yang unsur-unsurnya masih tetap seperti KTN, yaitu Australia sebagai wakil Indonesia, Belgia wakil Belanda, dan Amerika Serikat dipilih oleh kedua perwakilan tersebut sebagai negara ketiga dan UNCI diberi wewenang yang lebih luas daripada KTN. UNCI mendesak kepada Belanda supaya segera melaksanakan resolusi, tetapi pemerintah Belanda bermaksud menyingkiri Resolusi Dewan Keamanan dan mengesampingkan Komisi PBB untuk Indonesia. Cara yang digunakan untuk mengelak adalah dengan mengajukan rencana Beel. Soekarno-Hatta secara tegas menolak rencana Beel yang pada hakekatnya tidak mau melaksanakan resolusi dan akan menjalankan rencananya sendiri yang sangat merugikan pihak RI.

Sementara itu, untuk membantu perjuangan bidang diplomasi, maka TNI bersama rakyat mengadakan perlawanan dengan cara gerilya. Kemudian direncanakan untuk

diadakan suatu serangan secara besar-besaran untuk merebut ibukota Yogyakarta. Sebelum serangan dilaksanakan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Penyerangan dipimpin Oleh Letkol Soeharto dan Kota Yogyakarta dapat direbut dan dikuasai kembali dalam waktu enam jam pada tanggal 1 Maret (M. C. Ricklefs, 2005:349). Rakyat Yogyakarta dan sekitarnya ikut berjuang membantu TNI mengusir tentara Belanda dari dalam kota.

Peristiwa penyerangan tersebut disiarkan ke luar negeri melalui pemancar radio dari Wonosari. Berkat kerja sama antara TNI dengan rakyat semua rencana berjalan lancar. Berita Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebar ke penjuru dunia dan dapat mempengaruhi pendirian internasional khususnya di DK-PBB dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda. Untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, Dewan Keamanan PBB mempercayakan kepada UNCI. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 26 Maret 1949 Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI) mengundang ketua delegasi Belanda dan Indonesia agar memulai pembicaraan tentang persoalan yang terjadi di Indonesia (Ide Anak Agung Gde Agung, 1983:265).

Elink Schuurman (wakil ketua delegasi Belanda) menjawab undangan UNCI dengan mengatakan pemerintah Belanda bersedia untuk turut serta dalam pembicaraan itu dengan syarat bahwa hak-hak, tuntutan-tuntutan, dan kedudukan kedua belah pihak tidak dirugikan. Kesediaan Belanda ikut serta dalam pembicaraan yang diselenggarakan oleh UNCI tersebut setelah melakukan *new move* dengan mengunjungi Sukarno-Hatta di Bangka untuk menawarkan undangan agar RI bersedia berunding dalam KMB. Sukarno-Hatta berpendirian teguh bahwa perundingan baru bisa dilaksanakan setelah pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta.

Pertemuan dua delegasi (Indonesia-Belanda) di bawah UNCI diselenggarakan pada tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen dan wakil ketua adalah Bloom. Sedangkan delegasi Indonesia di bawah pimpinan Moh. Roem dan wakil ketua Mr. Ali Sastroamidjojo. Sebagai mediator atau penengah pertemuan dipimpin oleh Cochran (Nyoman Dekker, 1980:79). Pada pembukaan perundingan, Cochran mengingatkan bahwa yang harus dicapai dalam konferensi pertama mengenai paragraf 1 dan 2 Resolusi DK-PBB tanggal 28 Januari 1949 (Ide Anak Agung Gde Agung, 1983:287).

Untuk mengatasi kesulitan mencapai kesepakatan, Hatta memberikan solusi dengan jalan mengadakan perundingan informal antara RI, Belanda, dan UNCI (Sartono Kartodirdjo, 1975:66). Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil disepakati tentang tiga mata acara yang ditetapkan dalam suatu maklumat bersama, yakni: (1) Sukarno-Hatta dikembalikan ke Yogyakarta, (2) Kesiediaan mengadakan penghentian tembak menembak, (3) Kesiediaan mengikuti Konferensi meja bundar (Nyoman Dekker, 1980:79). Dikembalikannya Sukarno-Hatta di ibukota RI (Yogyakarta), berarti gambaran jalan menuju damai nampak terbuka.

Sebelum pelaksanaan konferensi meja bundar pihak Republik Indonesia dan BFO melaksanakan konferensi yang dikenal dengan Konferensi Antar Indonesia (KAI). KAI dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama dilakukan di Yogyakarta dengan tujuan membahas dan mendekatkan pendirian-pendirian mengenai berbagai segi persoalan Indonesia terutama sikap Negara Indonesia Serikat yang akan datang dengan pemerintah Belanda. Dalam konferensi ini tidak diambil keputusan-keputusan, karena hasil musyawarah akan diikhtikarkan di dalam semacam resolusi pada bagian kedua konferensi ini (Nugroho Notosusanto, 1971:42). Dengan kata lain bahwa Konferensi Antar Indonesia I membahas masalah yang akan diputuskan dalam Konferensi Antar Indonesia II. Konferensi Antar Indonesia II diselenggarakan di Jakarta (31 Juli hingga 2 Agustus 1949). Delegasi Republik dipimpin oleh wakil presiden Moh. Hatta. Konferensi membahas masalah pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta dan merumuskan secara terperinci.

Pemerintah Republik Indonesia sudah memiliki Presiden dan Wakil Presiden, namun presiden negara serikat akan dipilih oleh wakil-wakil dari Republik dan BFO. Ketua delegasi menyetujui untuk dibentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas mengkoordinir persiapan dan penyelenggaraan segala apa yang diperlukan selama dan sesudah konferensi meja bundar berlangsung. Ketua delegasi juga menyetujui bahwa pemerintah federal tidak hanya menerima penyerahan kedaulatan dari republik (Sartono Kartodirdjo, 1975:71). Sebagai kesimpulan bahwa Konferensi Antar Indonesia merupakan perundingan yang dilakukan oleh RI dan BFO dengan tujuan menyamakan visi menghadapi Belanda menjelang diselenggarakannya KMB. Konferensi tersebut merupakan tindakan bersejarah dalam membina persatuan dan kesatuan dan digunakan

untuk sarana mempererat persaudaraan rakyat Indonesia dan cita-cita menuju nasional dalam memperoleh kedaulatan yang sah, sehingga bangsa Indonesia berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain di dunia yang merdeka.

### **Metode Penelitian**

Pada penulisan karya ilmiah ini peneliti menggunakan metode historis yang terdiri dari beberapa tahap, diantaranya pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi, Interpretasi, dan penulisan (historiografi) , (Kuntowijoyo, 2002: 64).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Konferensi Meja bundar**

Setelah pemberlakuan gencatan senjata, penentuan waktu dan syarat-syarat konferensi meja bundar disepakati oleh Belanda, RI dan BFO, maka pelaksanaan konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 secara resmi dimulai yang bertempat di gedung Ridderzaal (Bangsa Ksatria), Den Haag, Belanda. Pembukaan konferensi meja bundar ditandai oleh 5 pidato sambutan yakni: (1) pidato sambutan Perdana Menteri Belanda Dr. W. Dress, (2) pidato sambutan Perdana Menteri RI Drs. Mohammad Hatta, (3) pidato sambutan Ketua BFO Sultan Hamid II, (4) pidato sambutan Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda Mr. J.H van Maarseveen, dan (5) pidato sambutan ketua mingguan UNCI Thomas K. Critchley (Ide Anak Agung Gde Agung, 1985:624)

Pada sidang pertama ditentukan Ketua konferensi meja bundar dan susunan para delegasi. Kesepakatan yang dicapai dalam sidang pertama, yakni: (1) Ketua konferensi meja bundar Dr. W Drees, (2) Sekretaris Jenderal konferensi meja bundar Mr. M.J Prinsen. (3) Ketua Delegasi Belanda Mr.J.H van Maarseveen, Wakil Ketua I Mr. D.U. Stikker, Wakil Ketua II Dr. J.H van Roijen, Sekretaris Mr. E.E.J. van der Valk, dan para anggota terdiri dari menteri-menteri, anggota Staten General dan pejabat lainnya. (4) Ketua Delegasi RI Drs. Mohammad Hatta, Wakil Ketua Mr. A.K. Pringgodigdo, Sekretaris I Prof. Mr. Dr. Soepomo Sekretaris II W.J Latumenten, dan anggota terdiri dari menteri-menteri, para perwira, dan anggota

parlemen. (5) Ketua Delegasi BFO Sultan Hamid II, Wakil Ketua Mr. I.A.A.G Agung, Sekretaris Mr. A.J Vleer, dan para anggota terdiri dari pemimpin-pemimpin anggota BFO. (6) Ketua Delegasi UNCI Merle H. Cochran, Ketua Mingguan Thomas K. Critchley, dan seorang anggota yakni Raymond Herremans (Ide Anak Agung Gde Agung, 1985:626).

Pembicaraan dalam konferensi meja bundar dilanjutkan pada tanggal 16 September 1949 di Namen, Belgia untuk membahas Peraturan Dasar Uni Indonesia-Belanda dan kesepakatan tercapai pada tanggal 18 September 1949 oleh semua delegasi. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 1949 di gedung Hoge Vuurse, Baarn disepakati ketentuan jumlah utang RIS yang harus dibayar kepada Belanda yakni f 4.300.000. kesepakatan pembayaran utang itu disepakati oleh RI dan BFO karena mendapat tekanan politis dari Merle H. Cochran. RI dan BFO merasa dirugikan oleh Belanda karena pembayaran utang itu dihitung dari tahun 1945 hingga 1949, yang berarti RIS mengganti biaya pada perang Agresi Militer Belanda I dan II (Ide Anak Agung Gde Agung, 1985:630).

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober di Scheveningen delegasi RI dan BFO menyepakati naskah Undang-Undang Dasar Sementara RIS. Kesepakatan itu tidak mengalami kesulitan karena pokok-pokok naskah Undang-Undang Dasar Sementara RIS sudah dirumuskan dalam Konferensi Antar Indonesia yang lalu (Ide Anak Agung Gde Agung, 1985:631). Kesepakatan naskah Undang-Undang Dasar Sementara RIS diperlukan untuk menyusun sistem ketatanegaraan dan sistem hukum RIS. Dalam bidang militer dicapai kesepakatan yakni (1) penarikan mundur tentara Belanda dari Indonesia, (2) penggabungan KNIL ke dalam Angkatan Perang RIS, dan (3) pengaturan jumlah personil dan sarana militer Angkatan Perang RIS (Nugroho Notosusanto, 1971:43). Selain itu, dicapai kesepakatan kerjasama sosial-budaya, yakni: hubungan sosial-budaya dalam Uni-Indonesia diatur atas sukarela, bersifat timbal balik, dan universal (Ide Anak Agung Gde Agung, 1985:632).

Pasal penyerahan kedaulatan delegasi Belanda tidak bersedia menyerahkan Irian Barat (West Guinea, sekarang bernama Irian Jaya) kepada RIS. Alasannya karena menurut budaya dan etnologis, masyarakat Irian Barat bukan termasuk masyarakat Indonesia (Ketut Sedana dan Ketut Margi, 2014:108). Selain itu,

delegasi Belanda tidak mempercayai kemampuan RIS mengurus Irian Barat karena peradaban masyarakat Irian Barat masih sangat sederhana. Delegasi RI dan BFO menyanggah alasan delegasi Belanda dengan menjelaskan bahwa Irian Barat termasuk bekas wilayah Hindia Belanda, yang harus diserahkan kepada RIS karena penyerahan kedaulatan mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Delegasi Belanda tidak menyetujui penjelasan delegasi RI dan BFO, serta tetap mempertahankan Irian Barat (G. Moedjanto, 1988:59). Sikap delegasi Belanda tersebut menghambat proses penyelesaian konflik Indonesia-Belanda.

Raymond Herremans dan Thomas K. Critchley mendukung kebijakan delegasi Belanda dalam mempertahankan Irian Barat. Sikap Raymond Herremans disebabkan Belgia merupakan sekutu Belanda, sedangkan Sikap Thomas K. Critchley disebabkan oleh pemerintah Australia menginstruksikan kepada Critchley agar mendukung delegasi Belanda dalam mempertahankan Irian Barat. Australia tidak menyetujui penyerahan Irian Barat karena khawatir keamanan Australia terganggu jika Irian Barat menjadi wilayah RIS (T.B Simatupang, 1980:179). Hal ini menyebabkan hambatan dalam konferensi meja bundar.

Untuk menyelesaikan masalah Irian Barat, Cochran mengajukan naskah kompromi kepada delegasi RI, BFO dan Belanda. Naskah kompromi tersebut berisi bahwa status Irian Barat tetap di bawah kekuasaan Belanda dengan ketentuan dalam waktu setahun setelah penyerahan kedaulatan akan ditentukan status finalnya dengan cara perundingan. Ketiga delegasi menyetujui naskah kompromi tersebut, sehingga masalah Irian Barat dapat diselesaikan untuk sementara (G. Moedjanto, 1989:59).

Sebagaimana dijelaskan Notosoetardjo (1956:69-78), pada tanggal 1 November 1949 semua kesepakatan konferensi meja bundar dirumuskan menjadi resolusi pelingkup. Ada tiga persetujuan dalam resolusi pelingkup yakni: (1) Piagam Penyerahan kedaulatan, (2) Peraturan Dasar Uni Indonesia-Belanda, dan (3) Lampiran Status Uni Indonesia-Belanda. Resolusi pelingkup tersebut diberlakukan setelah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Setelah resolusi pelingkup disetujui oleh semua delegasi, maka pada tanggal 2 November 1949 Dr. W Drees secara resmi menutup konferensi meja bundar (Ide Anak Agung Gde Agung,

1985:314-315). Dengan demikian persiapan untuk pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda akan segera dilakasanakan.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan konferensi meja bundar menghasilkan kesepakatan yakni Indonesia menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan merupakan UNI kerajaan Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda, selanjutnya Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS selambat-lambatnya pada akhir tahun 1949. Kemudian semua hutang bekas Hindia-Belanda akan ditanggung oleh RIS dan masalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun sesudah penyerahan kedaulatan, serta pasukan KNIL akan bergabung dalam pasukan Angkatan Perang RIS (APRIS) dan berangsur-angsur akan mengambil alih penjagaan keamanan diseluruh wilayah RIS.

Meskipun hasil konferensi meja bundar menguntungkan bagi Indonesia akan sebagian keputusan masih membuat Indonesia mengalami kerugian seperti penanggungan hutang Belanda, penyelesaian untuk status kedudukan Irian Barat yang tertunda dan wilayah Indonesia yang terpecah-pecah menjadi beberapa negara bagian membuat demokrasi yang dicita-citakan tidak terlaksana.

## **B. Pengaruh Konferensi Meja Bundar Terhadap Eksistensi Kemerdekaan Indonesia**

Konferensi meja bundar berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949, dalam konferensi dibentuk komisi-komisi antara lain: Komisi Ketatanegaraan, Keuangan, dan Militer. Biarpun dalam konferensi menemui banyak kesulitan, akhirnya dapat menelurkan hasil yang cukup menggembirakan hati bagi bangsa Indonesia. Semua itu tidak luput dari adanya persiapan yang matang dan atas kepedulian UNCI selaku utusan PBB.

Penyerahan kedaulatan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam dan pada saat yang sama penyerahan kedaulatan yang sebenarnya akan dilangsungkan di Jakarta. Dalam penyerahan kedaulatan di Jakarta, Lovink akan melaksanakan serah terima pemerintah tertinggi atas Indonesia kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai delegasi Pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Bendera Belanda yang selama itu masih berkibar di atas atap Istana akan

diturunkan diganti dengan Bendera Nasional Indonesia. Hal tersebut sebagai bukti pengakuan berakhimya kekuasaan kolonial Belanda dan suatu permulaan berlakunya tertib hukum baru. Peristiwa bersejarah tersebut suatu periode perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan yang penuh pengorbanan.

Pelaksanaan penyerahan kedaulatan berjalan lancar dan tertib, pada tanggal 25 November 1949 dibentuk sebuah komisi kecil yang disebut Panitia Persiapan Nasional. Komisi tersebut bertugas untuk melaksanakan persiapan penyerahan kedaulatan Indonesia dan mengatur semua yang berkenaan dengan pembentukan alat-alat perlengkapan negara Republik Indonesia Serikat. Sebagai ketua komisi delegasi Republik adalah Moh. Roem dan wakilnya Anak Agung (Ide Anak Agung Gde Agung, 1995:434). Komisi segera mengadakan rapat istimewa dengan maksud agar Undang-Undang Sementara RIS dapat dinyatakan berlaku. Selanjutnya tanggal 16 Desember 1949, Parlemen dan Senat RIS mengangkat Soekarno sebagai Presiden RIS dengan Wakil Presidennya Moh. Hatta (Suratimin, 1980:98).

Pemerintah RIS telah dibentuk, kemudian mengangkat delegasi RIS yang akan menghadiri upacara penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Penyerahan kedaulatan diselenggarakan dalam tiga tempat, yakni: di Amsterdam, Jakarta dan Yogyakarta. Delegasi yang menghadiri penyerahan kedaulatan di negeri Belanda dipimpin oleh Perdana Menteri Moh. Hatta, di Jakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sedang di Yogyakarta diterima oleh A. Mononutu (Menteri Penerangan RIS (Nyoman Dekker, 1980:88).

Sebenarnya apabila direnungkan dengan akal sehat atau rasio bukan memakai istilah penyerahan kedaulatan, tetapi pengakuan kedaulatan. Sebab setelah Perang Dunia II selesai tentara Jepang menyerah kepada Sekutu, dan Belanda belum berhasil memasuki wilayah Indonesia, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Jadi biarpun bangsa-bangsa Barat beranggapan bahwa setelah Jepang menyerah, wilayah yang dikuasai Jepang kembali kepada pemilik semulanya, namun bangsa Indonesia telah berhasil merdeka. Terjadinya persengketaan yang berkepanjangan bukan bangsa Indonesia yang menjadi penyebab utamanya, tetapi justru pihak Belanda sendiri

yang tidak tahu diri.

## **SIMPULAN**

Kedatangan Belanda di Indonesia pada pasca peristiwa Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan tegaknya proklamasi. Pemerintah RI pada awalnya memulai perjuangan melalui jalan diplomasi di samping perjuangan fisik yang dilakukan TNI. Kebijakan pemerintah RI bahwa melalui perundingan, masalah Indonesia akan menjadi masalah internasional, sehingga dalam menghadapi ancaman Belanda akan lebih ringan sebab mendapat dukungan internasional. Melalui perjuangan diplomasi dapat menghasilkan perjanjian Linggajati dan Renville. Namun kedua perjanjian tersebut ternyata tidak berumur panjang, karena Belanda mengkhianati dengan melakukan Agresi Militernya sampai dua kali. Dampak terjadinya agresi yang dilakukan Belanda semakin membuat keruh suhu politik dalam negeri.

Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Peserta konferensi adalah wakil-wakil dari pemerintah RI, pihak Belanda dan BFO, serta hadir pula komisi PBB untuk Indonesia yang disebut UNCI. Untuk memperlancar jalannya konferensi dibentuk lima komisi, yakni: Komisi untuk Urusan Politik dan Konstitusional. Komisi untuk Urusan Keuangan dan ekonomi, Komisi untuk Urusan Militer. Komisi untuk Urusan Kebudayaan, dan Komisi untuk Urusan Sosial. Jalannya konferensi tidak semua dapat berjalan lancar. Permasalahan yang dimaksud adalah mengenai di bidang ekonomi dan politik. Bidang ekonomi mengalami jalan buntu, terutama saat membahas hutang-hutang Belanda. Sedangkan di bidang militer adalah masalah Irian Barat. Namun berkat kepedulian Komisi PBB (UNCI) akhirnya dapat dicapai kata sepakat dan menghasilkan suatu keputusan yang sangat berarti bagi Indonesia. Adapun keputusan-keputusan tersebut yakni Indonesia menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan merupakan UNI kerajaan Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda, selanjutnya Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS selambat-lambatnya pada akhir tahun 1949. Kemudian semua hutang bekas Hindia-Belanda akan ditanggung oleh RIS dan masalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun

sesudah penyerahan kedaulatan, serta pasukan KNIL akan bergabung dalam pasukan Angkatan Perang RIS (APRIS) dan berangsur-angsur akan mengambil alih penjagaan keamanan diseluruh wilayah RIS.

Berakhirnya konferensi meja bundar telah membawa dimensi baru di dalam persoalan Indonesia. Konferensi meja bundar merupakan kemenangan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia melalui jalan diplomasi dengan pihak Belanda. Sebagai bukti nyata pertanggungjawaban Muhammad Hatta sebagai Ketua delegasi RI dalam konferensi meja bundar dapat diterima pemerintah RI maupun parlemen-parlemen di negara bagian. Penyerahan kedaulatan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949 dari Ratu Yuliana kepada Moh. Hatta di Istana Amsterdam Nederland negeri Belanda, sedang di Indonesia diselenggarakan di Jakarta dan Yogyakarta. Adanya konferensi meja bundar bangsa Indonesia mulai memasuki era baru dalam kehidupan pemerintahan. Bentuk negara yang dihasilkan konferensi meja bundar Negara Serikat kurang dapat diterima oleh rakyat. Akibat banyaknya tuntutan dari negara-negara bagian, akhirnya kembali menjadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang.

### Daftar Pustaka

- Dekker, Nyoman, 1980, *Sejarah Revolusi Nasional*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Ide Anak Agung Gde Agung, 1983, *Renville*, Jakarta Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Pernyataan Royen van Roijen 7 Mei 1949*, Jakarta: Yayasan Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Ketut Sedana dan Ketut Magi, 2014, *Sejarah Indonesia: dari Proklamasi sampai orde Reformasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marwati Djoened Puspoenegoro dan Nugroho Notosusanto, 1990, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Moedjanto, G., 1988, *Indonesia Abad ke-20 I: Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*, Yogyakarta: Kanisius.
- \_\_\_\_\_, 1989, *Indonesia Abad ke-20 I: Dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai PELITA III*, Yogyakarta: Kanisius.
- Notosoetardjo, 1956, *Dokumen Konperensi Medja Bundar*, Jakarta: NV. Pustaka.

- Nugroho Notosusanto, 1964, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*, Bandung: Mega Bookstore bekerjasama dengan Pusat Sejarah Angkatan Bersejanta.
- \_\_\_\_\_, 1971, *Norma-norma Penelitian dan Penulisan Sejarah*, Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI.
- Purnawan Tjondonegoro, 1982, *Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku 1*, Jakarta: CV. Nugroho.
- Ricklefs, M.C., 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (terj. S. Wahyono, dkk.), Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Rushdy Hoesein, 2010, *Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati*, Jakarta: Kompas.
- Sartono Kartodirdjo, dkk, 1975, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Simatupang, T.B., 1980, *Laporan dari Banaran*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Suratimin dan M. Roem, 1986, *Karya dan Pengabdian*, Jakarta: Proyen Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.